

Studi Kesiapan Direktorat Standardisasi Dalam Menerapkan SNI ISO/IEC 17065

Study of The Directorate of Standardization Readiness in Implementing SNI ISO/IEC 17065

Awangga Febian Surya Admaja

*Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110*

awan002@kominfo.go.id

Naskah diterima: 9 Juli 2013; Direvisi: 30 Juli 2013; Disetujui: 23 Agustus 2013

Abstract— ISO / IEC Guide 17065 : 2012 is an international guideline containing criteria for institutions that implement the certification system for products, processes and services. These guidelines ensure a certification system will be consistent and reliable so it can be accepted in national and international forums. As a certification agency, the Directorate of Standardization is required to manage its activities in a professional manner referring to standards or best practices that exist. This study aims to look at Directorate of Standardization readiness in implementing ISO / IEC 17065 : 2012. This study use a quantitative approach through survey by using gap analysis. The gap value shown the state of the Directorate of Standardization current condition with the criteria required by the ISO / IEC 17065, in addition to the condition of the findings is given an alternative form of organization of the Directorate of Standardization that have more support in the implementation of ISO / IEC 17065.

Keywords— Directorate of Standardization, ISO/IEC 17065, GAP Analysis

Abstrak— ISO / IEC Guide 17065 : 2012 adalah pedoman internasional yang berisi kriteria untuk lembaga yang melaksanakan sistem sertifikasi produk, proses dan jasa. Pedoman ini menjamin suatu lembaga sertifikasi melaksanakan sistem sertifikasi secara konsisten dan dapat diandalkan sehingga memudahkan penerimaannya di forum nasional dan internasional. Sebagai suatu lembaga sertifikasi, Direktorat Standardisasi dituntut untuk mengelola kegiatannya secara profesional merujuk kepada standar atau *best practice* yang ada. Studi ini bertujuan untuk melihat Bagaimana kesiapan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dalam menerapkan SNI ISO / IEC 17065 : 2012. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei dengan menggunakan teknik analisis kesenjangan untuk melihat kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Studi ini menghasilkan nilai kesenjangan antara kondisi Direktorat Standardisasi saat ini dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh SNI ISO / IEC 17065, selain itu diberikan alternatif bentuk organisasi dari

Direktorat Standardisasi yang lebih mendukung dalam penerapan SNI ISO / IEC 17065.

Kata kunci— Direktorat Standardisasi, SNI ISO/IEC 17065, Analisis Kesenjangan

I. PENDAHULUAN

Sebuah produk pada saat didesain, diproduksi, didistribusikan, digunakan dan pada akhirnya dibuang, produk tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kekhawatiran yang sering timbul adalah apakah produk itu seperti seharusnya. Kekhawatiran dapat terkait dengan keselamatan, kesehatan atau dampaknya terhadap fungsi lingkungan hidup. Disinilah peran sertifikasi produk, yang berguna untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, bahkan dapat diperoleh manfaat ganda, yaitu: konsumen dapat mengambil keputusan yang lebih baik terhadap produk yang ada di pasar; dengan telah disertifikasinya produk, produsen dapat secara efektif memperoleh keberterimaan pasar.

Sertifikasi produk (istilah ini mencakup juga proses atau jasa) adalah suatu cara untuk menjamin bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan serta dokumen normatif lain. Beberapa sistem sertifikasi produk mencakup pengujian awal produk dan asesmen sistem mutu pemasoknya, diikuti dengan pengawasan terhadap sistem mutu pabrik dan pengujian sampel dari pabrik dan pasar. Sistem lain hanya mengandalkan pengujian awal dan pengujian survailen, adapula sistem lain yang hanya terdiri dari pengujian tipe.

ISO/IEC Guide 17065:2012 adalah pedoman internasional yang berisi kriteria untuk lembaga yang melaksanakan sistem sertifikasi produk, proses dan jasa. Bila suatu lembaga akan diakreditasi di seluruh dunia sesuai dengan aturan harmonisasi yang sesuai dengan persyaratan ISO/IEC Guide 17065:2012, maka diperlukan beberapa panduan yang mengacu kepada Pedoman ini. Salah satu tujuannya adalah

untuk menjamin badan akreditasi dapat mengharmonisasikan permohonan mereka terhadap standar yang diperlukan dalam mengases lembaga sertifikasi. Ini merupakan salah satu langkah penting ke arah saling pengakuan dalam bidang akreditasi. Diharapkan bahwa pedoman ini juga akan berguna bagi lembaga sertifikasi itu sendiri dan bagi pihak-pihak yang menetapkan keputusan berdasarkan sertifikat dari lembaga sertifikasi.

ISO/IEC Guide 17065:2012 menetapkan persyaratan yang harus diikuti untuk menjamin lembaga sertifikasi melaksanakan sistem sertifikasi pihak ketiga secara konsisten dan dapat diandalkan sehingga memudahkan penerimaannya di forum nasional dan internasional dan dengan demikian memacu perdagangan internasional.

Persyaratan yang terdapat dalam ISO/IEC Guide 17065:2012 merupakan kriteria umum bagi organisasi yang melaksanakan sistem sertifikasi produk; persyaratan ini perlu dipertegas bila digunakan oleh industri spesifik atau sektor lain, atau bila harus mempertimbangkan persyaratan khusus seperti kesehatan dan keselamatan. Pernyataan kesesuaian dengan standar terkait atau dokumen normatif lain dituangkan dalam bentuk sertifikat atau marka kesesuaian. Sistem sertifikasi produk tertentu atau kelompok produk terhadap standar yang ditetapkan atau dokumen normatif lain, dalam berbagai kasus membutuhkan dokumentasi penjelasan tersendiri.

Sementara Pedoman ini menyangkut pihak ketiga yang melaksanakan sertifikasi produk, beberapa ketentuan dapat juga digunakan untuk prosedur asesmen kesesuaian produk oleh pihak pertama dan kedua. Ragamnya sistem sertifikasi mungkin dianggap tidak perlu bahkan membingungkan pendatang baru, pelanggan dan operator di bidang ini. Publikasi ISO/IEC Certification and related activities (Sertifikasi dan kegiatan terkait) tersedia sebagai bahan bacaan pendukung dan akan membantu menjawab berbagai pertanyaan mengenai cara kerja masyarakat asesmen kesesuaian seluruh dunia.

Oleh karena itu sebagai lembaga sertifikasi, Direktorat Standardisasi dituntut untuk mengelola kegiatannya secara profesional merujuk kepada standar atau best practice yang ada.

Sesuai dengan Permen Kominfo No 17 tahun 2010, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika menyelenggarakan fungsi diantaranya penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika (Kemenkominfo, 2010).

Dalam hal pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika, direktorat standardisasi sebagai lembaga sertifikasi harus mampu bekerja secara profesional dan dapat dipercaya oleh pengguna untuk pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. Sehingga lembaga ini harus merujuk kepada standar atau best practice yang ada yaitu SNI ISO/IEC Guide 17065:2012. Dengan menggunakan standard SNI ISO/IEC Guide 17065:2012 diharapkan produk dari dalam negeri yang

akan di ekspor menjadi produk yang dipercaya di luar negeri. Sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri.

Sebagaimana dengan uraian diatas maka pada kajian ini, diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

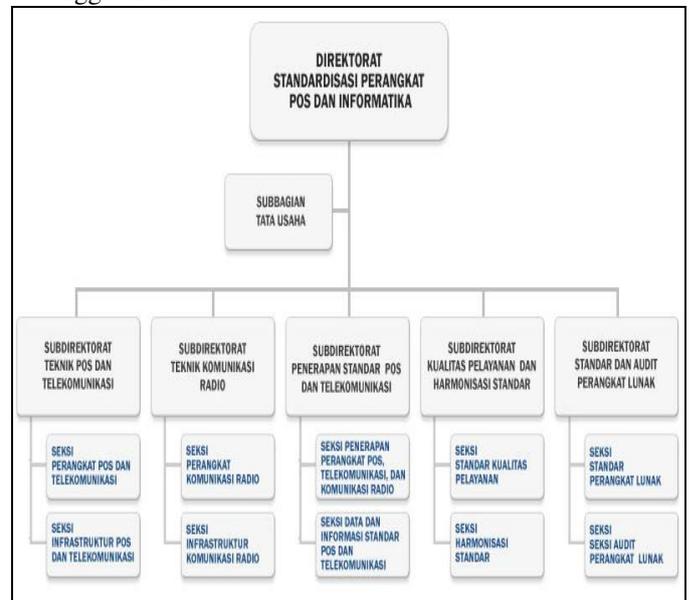
“Bagaimana kesiapan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dalam menerapkan SNI ISO/IEC 17065 : 2012”?

II. LANDASAN TEORI DAN GAMBARAN UMUM

A. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika merupakan unit kerja dibawah Direktorat Jenderal SDPPI yang memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika menyelenggarakan fungsi (Kemenkominfo, 2010):

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo (http://www.postel.go.id/artikel_c_1_p_590.htm)

Sebagaimana disajikan pada Gambar 1, Direktorat Standardisasi Pos dan Informatika terdiri atas beberapa subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam mendukung tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi.

1. Subdirektorat Teknik Pos dan Telekomunikasi;
2. Subdirektorat Teknik Komunikasi Radio;

3. Subdirektorat Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi;
4. Subdirektorat Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar;
5. Subdirektorat Standar dan Audit Perangkat Lunak; dan
6. Subbagian Tata Usaha.

Sebagai lembaga yang bertugas menyusun standardisasi dan mengeluarkan sertifikasi perangkat, dalam hal ini perangkat pos dan informatika, Direktorat Standardisasi dituntut untuk melakukannya secara profesional dan merujuk kepada standar internasional yang berkaitan dengan standardisasi, yaitu ISO/EIC Guide 17065 : 2012.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Analisis Implementasi Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001:2000 Dengan Menggunakan Gap Analysis Tools (Studi Kasus di PT PLN (Persero) PIKITRING JBN Bidang Perencanaan)” oleh Arfan Bakhtiar dan Bambang Purwanggono (Bakhtiar & Purwanggono, 2009). Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara penerapan sistem manajemen mutu perusahaan dengan sistem manajemen mutu standar ISO 9001:2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) PIKITRING Jawa, Bali & Nusa Tenggara bagian perencanaan memiliki nilai rata-rata di atas 75% sehingga dapat dikatakan telah siap untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 dan memenuhi persyaratan untuk sertifikasi ISO 9001: 2000.
2. Penerapan Gap Analysis Pada Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT.XYZ)” oleh Yoki Muchsam, Falahah dan Galih Irianto Saputro. Gap analysis pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja karyawan tahun PT.XYZ dengan kinerja standar karyawan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Uji coba sistem menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan bantuan yang berarti bagi pihak manajemen untuk menilai dan memberikan umpan balik kinerja bagi karyawan perusahaan(Muchsam, Falahah, & Saputro, 2011).
3. Perancangan dan Implementasi ISO 9001:2008 di PT. Bondi Syad Mulia, Surabaya oleh Bayu Perdana dan Jani Rahardjo. Penelitian dilakukan untuk melihat apakah seluruh persyaratan ISO 9001:2008 sudah terpenuhi oleh PT. Bondi Syad Mulia. PT Bondi Syad Mulia sendiri perusahaan yang bergerak dalam bidang industri jasa Hot Dip Galvanizing yang beralamatkan di jalan Rungkut Industri II no 35, Surabaya yang memiliki usaha di bidang pelapisan besi baja oleh lapisan zinc yang berfungsi untuk memperpanjang umur atau masa penggunaan besi baja tersebut. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei ke perusahaan yang bersangkutan untuk selanjutnya dilakukan analisis gap awal. Analisa gap awal bertujuan untuk mengetahui pasal yang sudah dan belum diterapkan di perusahaan. Analisa gap awal dilakukan sebelum tahap perancangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di perusahaan. Hasil analisa gap awal menunjukkan bahwa klausul persyaratan ISO 9001:2008 yang telah terpenuhi baru sebesar 34,55%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih belum memiliki sistem manajemen mutu

yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008. Pelatihan dan pengenalan tentang SMM ISO 9001:2008 diperlukan agar perusahaan dapat mengenal, merancang dan mengimplementasikan SMM ISO 9001:2008. Tahap selanjutnya adalah pembuatan manual mutu dan prosedur mutu. PT. Bondi Syd Mulia memiliki 36 prosedur mutu dan sembilan instruksi kerja, diantaranya terdapat enam prosedur yang diwajibkan pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. PT. Bondi Syad Mulia mulai melakukan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang meliputi penerapan prosedur mutu, instruksi kerja dan melakukan penyimpanan form rekaman yang dilakukan oleh masing- masing divisi. Analisa gap akhir dilakukan dan diperoleh hasil 100% persyaratan ISO 9001:2008 telah terpenuhi dan dijalankan oleh perusahaan. Evaluasi Sistem Manajemen Mutu di PT. Bondi Syad Mulia dilakukan melalui proses audit internal dan tinjauan manajemen. Evaluasi sasaran mutu dilakukan berdasarkan tingkat keberhasilan dan peningkatannya serta menjadi agenda pembahasan pada rapat tinjauan manajemen. Hasil dari rapat tinjauan manajemen di PT. Bondi Syad Mulia adalah didapat lima permasalahan utama dengan solusi untuk pencegahan dan peningkatannya.

C. ISO/IEC Guide 17065

ISO/IEC Guide 17065 : 2012 adalah pedoman internasional yang berisi kriteria untuk lembaga yang melaksanakan sistem sertifikasi produk, proses dan jasa. Bila suatu lembaga akan diakreditasi di seluruh dunia sesuai dengan aturan harmonisasi yang sesuai dengan persyaratan ISO/IEC Guide 17065:2012, maka diperlukan beberapa panduan yang mengacu kepada Pedoman ini. Salah satu tujuannya adalah untuk menjamin badan akreditasi dapat mengharmonisasikan permohonan mereka terhadap standar yang diperlukan dalam mengases lembaga sertifikasi. Ini merupakan salah satu langkah penting ke arah saling pengakuan dalam bidang akreditasi. Diharapkan bahwa pedoman ini juga akan berguna bagi lembaga sertifikasi itu sendiri dan bagi pihak-pihak yang menetapkan keputusan berdasarkan sertifikat dari lembaga sertifikasi.

ISO/IEC Guide 17065 : 2012 memiliki beberapa kriteria yang perlu diuji dalam persyaratan pelaksanaan pedoman ini yaitu :(BSN, 2012)

1. Persyaratan umum yang terdiri dari masalah hukum dan kontrak, manajemen ketidakberpihakan, tanggung gugat dan keuangan, kondisi non-diskriminasi, kerahasiaan dan ketersediaan informasi publik.
2. Persyaraan struktur yang terdiri dari struktur organisasi dan manajemen puncak serta mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan.
3. Persyaratan sumberdaya yang terdiri dari pengelolaan personil lembaga sertifikasi serta keberadaan sumber daya (SDM) untuk evaluasi.
4. Persyaratan proses yang terdiri dari persyaratan proses secara umum, pengajuan permohonan, tinjauan permohonan, proses evaluasi, tinjauan evaluasi, keputusan sertifikasi, dokumentasi sertifikasi, direktori produk yang disertifikasi, proses suvailen, perubahan yang mempengaruhi sertifikasi, kondisi proses sertifikasi (penghentian, pengurangan, pembekuan atau pencabutan sertifikasi), proses rekaman, keluhan dan banding.

5. Persyaratan sistem manajemen yang terdiri dari dokumentasi sistem manajemen umum, pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, tinjauan manajemen, audit internal, tindakan korektif serta tindakan pencegahan.

ISO/IEC Guide 17065 : 2012 merupakan revisi dari ISO Guide 65 yang dikeluarkan pada tahun 1996. Berdasarkan kebijakan transisi penerapan SNI ISO/IEC 17065:2012, disebutkan bahwa permohonan akreditasi dengan menggunakan ISO/IEC Guide 65:1996 masih dapat diterima sampai dengan tanggal 1 April 2013, dengan catatan bahwa assessmen sudah dilakukan sebelum 1 Oktober 2013. Merujuk kepada kebijakan transisi tersebut, maka Direktorat Standardisasi tidak lagi dapat mengajukan permohonan akreditasi berdasarkan ISO/IEC Guide 65 dan harus sudah beralih ke ISO/IEC 17065:2012.

D. GAP Analysis

Gap analysis membandingkan situasi saat ini dengan kondisi yang akan datang yang ingin dicapai. Dengan melakukan gap analysis, kita dapat mengidentifikasi apa yang kita butuhkan untuk menjembatani kesenjangan yang ada. Gap analysis dapat digunakan di tiap tahap untuk menganalisis kemajuan dari program atau proyek yang sedang dilaksanakan, walaupun demikian gap analysis paling bermanfaat bila dilakukan untuk mengawali sebuah program atau proyek. Untuk melaksanakan gap analysis, sebelumnya perlu diketahui apa tujuan proyek yang kita kerjakan. Hal tersebut merupakan kondisi yang kita inginkan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah menganalisa situasi saat ini dan pastikan bahwa informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber yang tepat. Langkah terakhir adalah mengidentifikasi bagaimana kita dapat menjembatani kesenjangan yang terjadi diantara kondisi saat ini dan target kita dimasa yang akan datang (*Merced Community College District*).

Di dalam proses penerapan ISO dan atau SNI, gap analysis merupakan langkah awal. Dengan adanya gap analysis diharapkan dapat diketahui langkah-langkah apa yang perlu diambil agar dengan mudah dapat mencapai kondisi atau standard yang diharapkan, dalam hal ini sesuai dengan standard yang ditentukan di dalam ISO dan atau SNI yang dijadikan acuan. Langkah perencanaan migrasi radio trunking di Indonesia dapat dilalui dari beberapa langkah atau tahapan yang pada dasarnya dilakukan sesuai tingkat kesiapan dan kemudahan dalam pelaksanaan langkah tersebut. variabel yang digunakan dalam menentukan langkah migrasi radio trunking digital adalah.

E. Self Assessment Analysis

Self assessment analysis merupakan metode untuk melihat kedalam diri sendiri dan menilai aspek-aspek yang penting sehingga dapat menunjukkan identitas dirinya. Metode self assessment dapat pula diterapkan dalam suatu organisasi guna melihat kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, kondisi seperti kesiapan terhadap teknologi baru, kondisi pencapaian tujuan, penanganan pajak dll. Metode self

assessment meninjau dari kondisi eksisting dari seseorang atau organisasi dan menentukan ekspektasi dengan melakukan analisis dan menyelesaikan permasalahan dengan menentukan self assessment checklist

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif didukung data kualitatif. Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kesiapan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dalam menerapkan ISO/IEC Guide 17065:2012. Sementara pendekatan data kualitatif untuk menghasilkan gambaran menyeluruh tentang kesiapan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dalam menerapkan ISO/IEC Guide 17065:2012.

B. Teknik Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) melalui daftar pertanyaan terstruktur.

C. Key-Informan

Key-informan dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam proses persiapan akreditasi SNI ISO/IEC Guide 17065 yaitu Kepala Seksi Data dan Informasi Standar Pos dan Telekomunikasi.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Jakarta sesuai dengan lokasi dimana Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika berada.

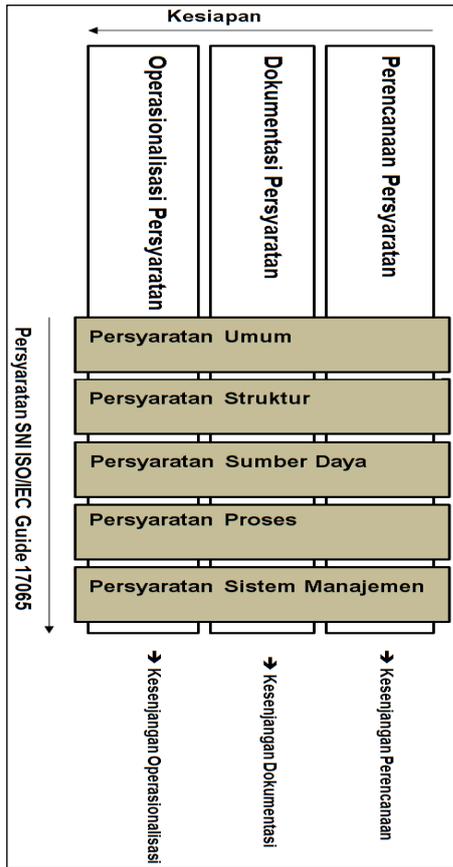
E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada key-informan di Direktorat Standardisasi.

F. Teknik Analisis

Studi ini menggunakan teknik analisis kesenjangan (*Gap Analysis*) dalam mengukur kesiapan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dalam menerapkan SNI ISO/IEC 17065:2012. Analisis kesenjangan digunakan untuk melihat kesenjangan antara kondisi sekarang dengan kondisi keadaan yang diharapkan yaitu kondisi yang dipersyaratkan dalam SNI ISO/IEC Guide 17065, dengan melihat kondisi kesiapan dengan persyaratan SNI ISO/IEC Guide 17065.

Kesenjangan (*gap*) diukur dari perbedaan antara pernyataan ket-informan pada kuesioner self-assessment dengan persyaratan SNI ISO/IEC Guide 17065. Indikator kuesioner bersumber dari item persyaratan-persyaratan pada SNI ISO/IEC Guide 17065 yang diberikan kepada key-informan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika yang diisi secara self-assessment.



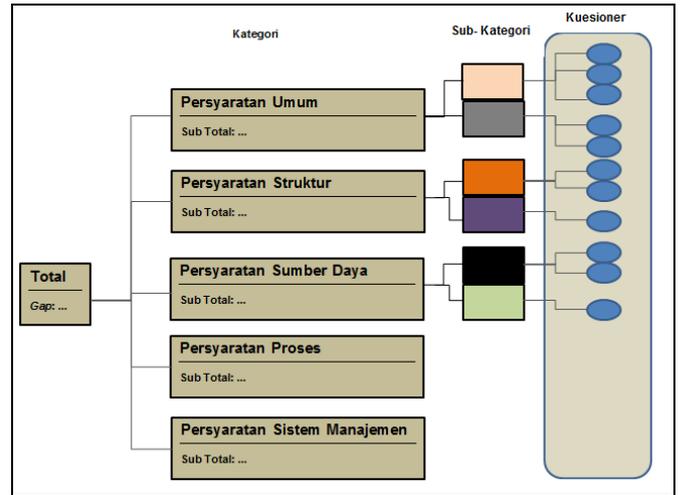
Gambar 2. Framework dalam Mengukur Gap

Adapun pengukuran kesiapan diukur berdasarkan skala semantik deferensial berdasarkan kriteria sebagai berikut:

TABEL 1. SKALA SELF-ASSESSMENT

Nilai	Status	Keterangan
0	Tidak Dilakukan	Jika pernyataan belum dilakukan sama sekali
1	Dalam Perencanaan	Jika pernyataan akan dilakukan dan dalam proses perencanaan
2	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	Jika pernyataan belum diterapkan secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi jika (1) telah dilakukan namun belum terdapat dokumentasi resmi atau pernyataan tertulis seperti Standar Operasional/Prosedur, dan lain sebagainya; atau (2) telah terdapat dokumentasi resmi namun belum diterapkan
3	Diterapkan Secara Menyeluruh	Jika pernyataan telah dilakukan baik terdapat dokumentasi resmi dan diterapkan

Adapun data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan kesiapan terhadap kelompok pernyataan kemudian dilakukan kalkulasi Total Nilai Kesenjangan (gap) terhadap masing-masing kategori dan sub kategori.



Gambar 3. Penilaian Kesenjangan

Kategori-kategori yang dinilai sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum berisi pernyataan-pernyataan persyaratan yang diperlukan secara garis besar sebagai Lembaga Sertifikasi, dengan sub kategori:

- Hukum dan Kontrak
- Ketidakberpihakan Tanggung
- Gugat dan Keuangan
- Non-Diskriminasi
- Kerahasiaan
- Ketersediaan Informasi Publik
- Mekanisme Menjaga Ketidakberpihakan

2. Persyaratan Struktur

Persyaratan struktur berisi pernyataan-pernyataan persyaratan susunan organisasi yang diperlukan dalam terbentuknya Lembaga Sertifikasi, seperti struktur umum dan ketidakberpihakan, dengan sub kategori:

- Struktur Organisasi dan Manajemen Puncak
- Mekanisme Menjaga Ketidakberpihakan

3. Persyaratan Sumber Daya

Persyaratan Sumber Daya berisi pernyataan-pernyataan persyaratan Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam mengoperasikan Lembaga Sertifikasi, dengan sub kategori:

- Personel Lembaga Sertifikasi
- Sumber Daya untuk Evaluasi

4. Persyaratan Proses

Persyaratan proses berisi pernyataan-pernyataan persyaratan proses yang diperlukan sebagai alur kerja Lembaga Sertifikasi, dengan sub kategori:

- Umum
- Permohonan
- Tinjauan Permohonan
- Evaluasi
- Tinjauan
- Keputusan Sertifikasi
- Dokumentasi Sertifikasi
- Direktori Produk yang Disertifikasi
- Survailen
- Perubahan yang Mempengaruhi Sertifikasi
- Penghentian, Pengurangan, Pembekuan Atau Pencabutan Sertifikasi

1. Keluhan dan Banding

5. Persyaratan Sistem Manajemen

Dalam standar persyaratan Sistem Manajemen, terdapat 2 opsi pertanyaan yaitu Opsi A dan Opsi B. Opsi A dimana terdapat dokumentasi sistem manajemen umum (misalnya, panduan, kebijakan, definisi tanggung jawab; pengendalian dokumen; pengendalian rekaman; tinjauan manajemen; audit internal; tindakan korektif; dan tindakan pencegahan. Sedangkan Opsi B yaitu memiliki Sistem Manajemen persyaratan ISO 9001.

a. Jika Memilih Opsi A, dengan sub kategori::

- 1) Dokumentasi Sistem Manajemen
- 2) Pengendalian Dokumen
- 3) Pengendalian Rekaman
- 4) Tinjauan Manajemen
- 5) Audit Internal
- 6) Tindakan Korektif
- 7) Tindakan Pencegahan

b. Jika Memilih Opsi B, dengan sub kategori:

- 1) Memiliki Sistem Manajemen ISO 9001

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Analisa dan pembahasan merupakan hasil dari self assesment yang diberikan kepada Direktorat Standardisasi. Dari hasil self assesment ditemukan dua kategori penilaian yaitu tingkat kesiapan dan gap antara kondisi yang sesuai dengan dokumen persyaratan ISO/IEC 17065 dengan kondisi saat ini. Sedangkan sudut pandang penilaian dilihat dari Kinerja Direktorat Standardisasi terkait dengan tupoksi bila dibandingkan dengan persyaratan ISO/IEC 17065 dan kelengkapan dokumentasi persyaratan agar dapat menerapkan ISO/IEC 17065 tersebut.

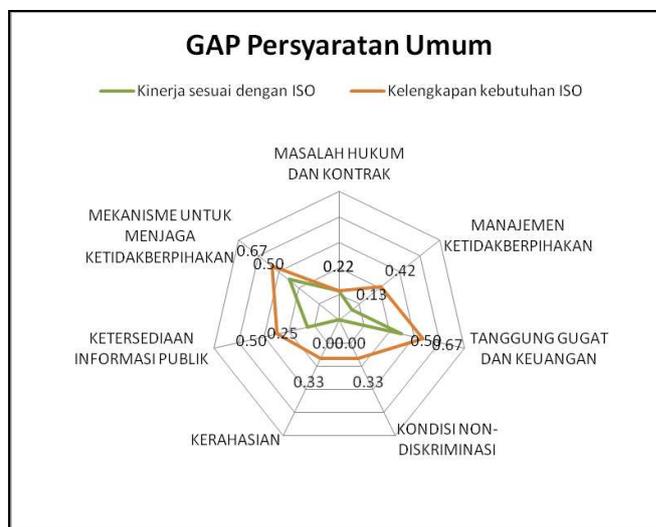
1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum berisi pernyataan-pernyataan persyaratan yang diperlukan secara garis besar sebagai Lembaga Sertifikasi, dengan dengan hasil kuesioner sebagai berikut:

TABEL 2. BAGIAN I : PERSYARATAN UMUM

BAGIAN I : PERSYARATAN UMUM	Kinerja Sesuai Dengan ISO		Kelengkapan Kebutuhan ISO	
	Tingkat Kesiapan	GAP	Tingkat Kesiapan	GAP
Masalah Hukum Dan Kontrak	77.78%	0.22	77.78%	0.22
Manajemen Ketidakberpihakan	87.50%	0.13	66.67%	0.33
Tanggung Gugat Dan Keuangan	50.00%	0.50	33.33%	0.67
Kondisi Non-Diskriminasi	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Kerahasiaan	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Ketersediaan Informasi Publik	75.00%	0.25	50.00%	0.50
Mekanisme Untuk Menjaga Ketidakberpihakan	50.00%	0.50	33.33%	0.67

Persyaratan umum terhadap masalah hukum dan kontrak memiliki nilai gap yang sama, hal ini dikarenakan suatu lembaga sertifikasi pemerintah dianggap badan hukum berdasarkan status pemerintahannya, sehingga kebutuhan dokumen ISO telah terpenuhi kecuali untuk perjanjian yang berdasarkan hukum mengenai ketentuan kegiatan sertifikasi kepada klien, karena saat ini Direktorat Standardisasi sedang merancang konsep perjanjian tersebut. Perbedaan gap manajemen ketidakberpihakan terletak di hampir semua persyaratan ISO yang disyaratkan dimana secara tupoksi Direktorat Standardisasi telah mengerjakan hal tersebut tetapi belum memiliki langkah dokumentasi terhadap kegiatan tersebut. Langkah dokumentasi tersebut dapat berupa SOP terkait dengan kegiatan terkait. Kinerja Direktorat Standardisasi yang telah memenuhi persyaratan ISO atau tupoksi yang telah sesuai dengan Standar ISO 17065 adalah persyaratan umum untuk kondisi non-diskriminasi dan sikap kerahasiaan hanya saja SOP terkait hal tersebut masih dalam tahap penyusunan.



Gambar 4. Grafik GAP Persyaratan Umum

Grafik gap persyaratan umum memperlihatkan bahwa gap dalam kelengkapan dokumen kebutuhan pemenuhan ISO/IEC 17065 sebagian besar kurang dari 0,5 sehingga terlihat bahwa Direktorat Standardisasi telah menuju tahap penyusunan dokumen kebutuhan persyaratan ISO tersebut. Dalam persyaratan umum terdapat sub kategori manajemen ketidakberpihakan dan mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan, dua sub kategori ini merupakan syarat bahwa suatu lembaga sertifikasi produk haruslah tidak memihak dan tidak mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil bersifat memihak, oleh karena itu suatu lembaga sertifikasi produk seharusnya merupakan suatu unit tersendiri diluar suatu organisasi yang menyusun suatu standar penentuan skema sertifikasi. Selain itu kondisi non-diskriminasi juga terkait dengan manajemen ketidakberpihakan sehingga hal ini bersifat rentan interferensi terhadap pengambilan keputusan sertifikasi. Perihal tersebut yang menjadi kendala Direktorat Standardisasi dalam mendapatkan ISO/IEC 17065 karena kondisi lembaga sertifikasi produk atau bagian yang bertugas untuk melaksanakan tugas sertifikasi produk akan memiliki garis tanggung jawab kepada pemegang kekuasaan dalam penentuan standar atau menjadi satu dengan badan organisasi yang memiliki wewenang dalam menentukan

perumusan dan penetapan regulasi produk terkait sertifikasi. Meskipun hasil dari self assesment menunjukkan bahwa kinerja manajemen ketidakberpihakan atau hal-hal yang terkait dengan kondisi non diskriminasi telah dilaksanakan secara menyeluruh meskipun belum memiliki dasar langkah kerja yang terdokumentasi.

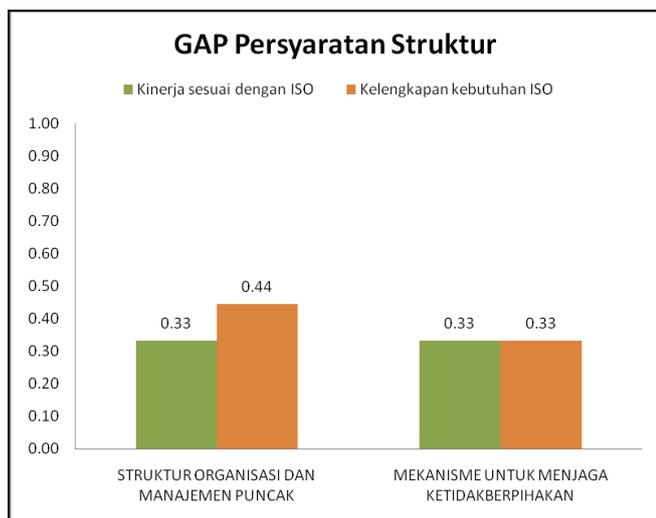
2. Persyaratan Struktur

Persyaratan struktur berisi pernyataan-pernyataan persyaratan susunan organisasi yang diperlukan dalam terbentuknya Lembaga Sertifikasi, seperti struktur umum dan ketidakberpihakan, dengan hasil sebagai berikut :

TABEL 3. BAGIAN II : PERSYARATAN STRUKTUR

BAGIAN II : PERSYARATAN STRUKTUR	Kinerja sesuai dengan ISO		Kelengkapan kebutuhan ISO	
	Tingkat Kesiapan	GAP	Tingkat Kesiapan	GAP
Struktur Organisasi Dan Manajemen Puncak	66.67%	0.33	55.56%	0.44
Mekanisme Untuk Menjaga Ketidakberpihakan	66.67%	0.33	66.67%	0.33

Dalam persyaratan struktur tingkat kinerja Direktorat Standardisasi telah mendekati sesuai dengan persyaratan ISO sehingga gap tersebut lebih kepada pemenuhan langkah kerja dari tupoksi yang dilaksanakan selama ini. Dalam persyaratan struktur, bentuk organisasi dan mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan dipusatkan karena hal ini merupakan persyaratan terkait dengan susunan manajemen organisasi, seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa suatu lembaga serifikasi tidak dapat berada dibawah suatu induk yang menyusun skema sertifikasi.



Gambar 5. Grafik GAP Persyaratan Struktur

Gap dalam persyaratan terlihat hanya antara 0,33 sampai dengan 0,44 dimana hal tersebut terkait dengan kondisi struktur organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Standardisasi saat ini. Struktur yang jelas memudahkan dalam pembagian dan pelaksanaan tupoksi yang ada dalam tubuh Direktorat Standardisasi terlepas dari efisiensi kinerja dari struktur organisasi tersebut. Secara struktur organisasi, tupoksi yang

diturunkan kepada level seksi subdirektorat memiliki langkah kerja yang sama sehingga hal tersebut sebetulnya dapat lebih efisien apabila seksi subdirektorat yang memiliki langkah kerja yang sama dapat dikumpulkan dalam satu subdirektorat sehingga data dan dokumentasi dapat lebih tertib dan tertata.

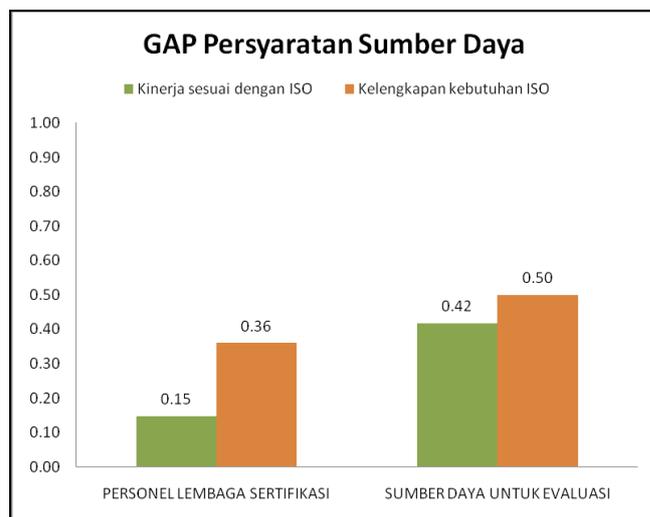
3. Persyaratan Sumber Daya

Persyaratan Sumber Daya berisi pernyataan-pernyataan persyaratan Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam mengoperasikan Lembaga Sertifikasi, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Bagian III : Persyaratan Sumber Daya

BAGIAN III : PERSYARATAN SUMBERDAYA	Kinerja sesuai dengan ISO		Kelengkapan kebutuhan ISO	
	Tingkat Kesiapan	GAP	Tingkat Kesiapan	GAP
Personel Lembaga Sertifikasi	85.33%	0.15	64.00%	0.36
Sumber Daya Untuk Evaluasi	58.33%	0.42	50.00%	0.50

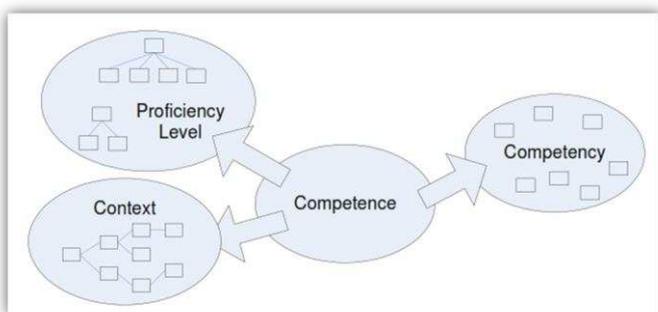
Setiap kegiatan evaluasi baik itu menggunakan sumber daya internal, menggunakan sumber daya lain yang masih berada di bawah pengendalian dari Direktorat Standardisasi, atau menggunakan sumber daya eksternal, maka standar yang digunakan dalam kegiatan evaluasi harus sesuai dengan persyaratan yang relevan dengan skema sertifikasi. Untuk pengujian merujuk kepada standar ISO/IEC 17025, untuk inspeksi merujuk kepada ISO/IEC 17020, untuk audit merujuk kepada ISO/IEC 17021. Dikarenakan setiap kegiatan evaluasi memiliki standar masing-masing dalam pelaksanaannya maka setiap personel lembaga sertifikasi seharusnya bersifat kompeten terhadap tugas yang dimilikinya.



Gambar 6. Grafik GAP Persyaratan Sumber Daya

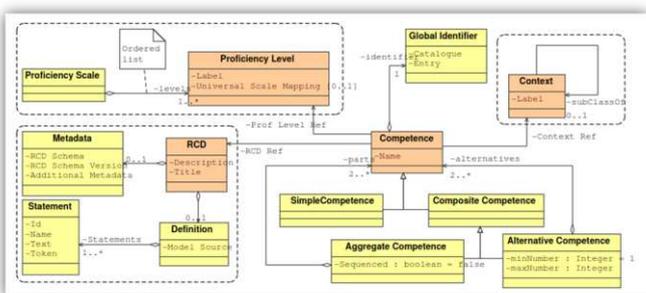
Persyaratan sumber daya, terutama terhadap sub kategori personel lembaga sertifikasi dapat dievaluasi tersendiri melalui gap terhadap kompetensi, selain menggunakan persyaratan standar terkait dengan kegiatan evaluasi sumber daya. Sumber daya manusia dianggap kompeten apabila telah memiliki tiga kriteria yaitu tingkat kompetensi, tingkat

kecakapan dan konteks atau kebutuhan spesifik terhadap standar kompeten.



Gambar 7. Kriteria standar nilai kompeten (De Coi, et al.)

Untuk melihat standar nilai kompeten dapat digambarkan dalam model tertentu tergantung dari spesifikasi standar kompeten dari perusahaan atau organisasi tersebut. Dari model tersebut, tingkat kecakapan, kompetensi dan konteks akan memiliki sub penilaian tersendiri yang akan mempengaruhi standar nilai kompeten.



Gambar 8. Contoh model kompetensi (De Coi, et al.)

4. Persyaratan Proses

Persyaratan proses berisi pernyataan-pernyataan persyaratan proses yang diperlukan sebagai alur kerja Lembaga Sertifikasi, dengan hasil self assessment :

Tabel 5. Bagian IV : Persyaratan Proses

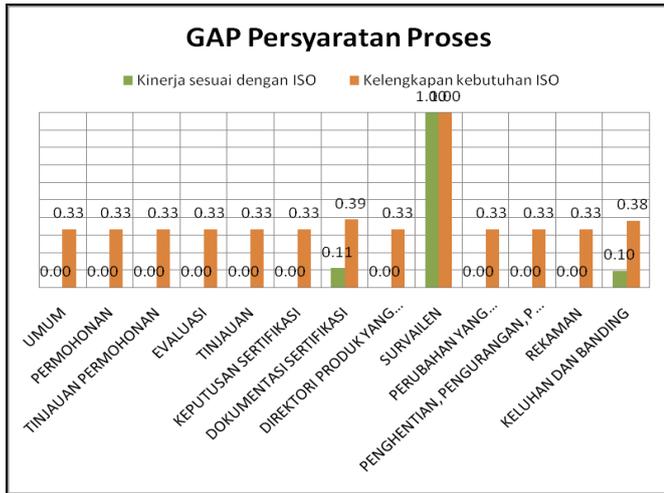
BAGIAN IV : PERSYARATAN PROSES	Kinerja sesuai dengan ISO		Kelengkapan kebutuhan ISO	
	Tingkat Kesiapan	GAP	Tingkat Kesiapan	GAP
Umum	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Permohonan	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Tinjauan Permohonan	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Evaluasi	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Tinjauan	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Keputusan Sertifikasi	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Dokumentasi Sertifikasi	88.89%	0.11	61.11%	0.39
Direktori Produk Yang Disertifikasi	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Survailen	0.00%	1.00	0.00%	1.00

BAGIAN IV : PERSYARATAN PROSES	Kinerja sesuai dengan ISO		Kelengkapan kebutuhan ISO	
	Tingkat Kesiapan	GAP	Tingkat Kesiapan	GAP
Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Penghentian, Pengurangan, Pembekuan Atau Pencabutan Sertifikasi	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Rekaman	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Keluhan Dan Banding	90.48%	0.10	61.90%	0.38

Unsur-unsur yang terdapat dalam skema sertifikasi Direktorat Standardisasi tersebut dapat digabungkan dengan survailen produksi atau dengan penilaian dan survailen sistem manajemen klien atau keduanya secara bersamaan, dimana pedoman umum untuk pengembangan skema diberikan atau dapat merujuk kepada pengembangan skema diberikan atau dapat merujuk kepada standar ISO/IEC 17067 yang dikombinasikan dengan ISO/IEC Guide 28 dan ISO/IEC Guide 53. Sedangkan untuk pedoman yang berisikan tentang persyaratan produk dari klien yang akan dievaluasi sebaiknya merujuk kepada pengembangan dokumen normatif yang terdapat dalam ISO/IEC 17007.

Permohonan dan tinjauan permohonan merupakan salah satu langkah skema proses sertifikasi, tata cara dan prasyarat dalam permohonan proses sertifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi telah tercantum dalam skema sertifikasi. Dalam persyaratan proses, hampir seluruh sub kategori telah dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi. Sampai dengan saat ini Direktorat Standardisasi belum melakukan survailen karena hal tersebut tidak tercantum dalam skema sertifikasi yang dimiliki oleh Direktorat Standardisasi, tetapi apabila skema sertifikasi mengharuskan adanya survailen dikarenakan beberapa hal seperti penggunaan tanda sertifikasi yang dapat digunakan oleh produk lain, dll, maka tindakan survailen harus merujuk kepada standar yang relevan dengan skema sertifikasi atau dapat merujuk kepada standar ISO/IEC 17067 atau apabila survailen menggunakan keputusan evaluasi, tinjauan atau keputusan sertifikasi dapat menggunakan persyaratan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktorat Standardisasi. Proses survailen terhadap produk telekomunikasi yang telah menerima sertifikasi dari Direktorat Standardisasi dianggap sangat sulit, hal ini terkait dengan jumlah produk telekomunikasi yang disertifikasi terlampau banyak dan setiap hari selalu ada permohonan baru.

Yang menjadi pokok dalam hasil *self assesment* persyaratan proses adalah kinerja Direktorat Standardisasi yang telah menerapkan persyaratan proses yang setara dengan standar internasional ISO, kecuali untuk dokumentasi sertifikasi, keluhan dan banding, serta survailen yang memang saat ini merupakan kendala.



Gambar 9. Grafik GAP Persyaratan Proses

5. Persyaratan Sistem Manajemen

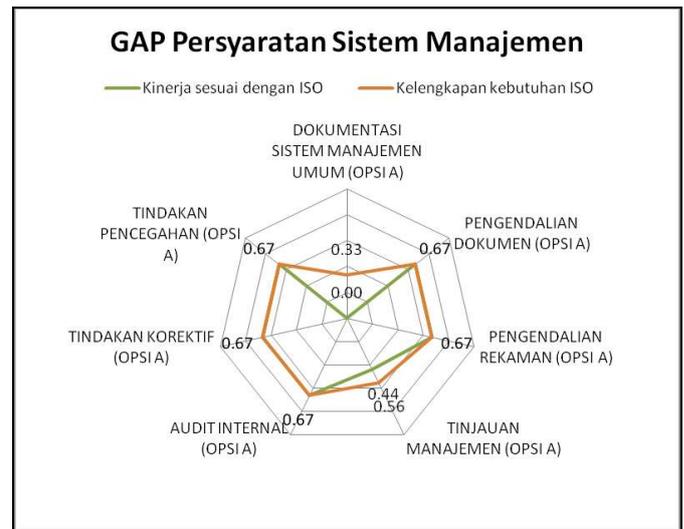
Dalam standar persyaratan Sistem Manajemen, terdapat 2 opsi pertanyaan yaitu Opsi A dan Opsi B. Opsi A dimana terdapat dokumentasi sistem manajemen umum (misalnya, panduan, kebijakan, definisi tanggung jawab; pengendalian dokumen; pengendalian rekaman; tinjauan manajemen; audit internal; tindakan korektif; dan tindakan pencegahan. Sedangkan Opsi B yaitu memiliki Sistem Manajemen persyaratan ISO 9001.

- a. Jika Memilih Opsi A, dengan sub kategori:
 - 1) Dokumentasi Sistem Manajemen
 - 2) Pengendalian Dokumen
 - 3) Pengendalian Rekaman
 - 4) Tinjauan Manajemen
 - 5) Audit Internal
 - 6) Tindakan Korektif
 - 7) Tindakan Pencegahan
- b. Jika Memilih Opsi B, dengan sub kategori:
 - 1) Memiliki Sistem Manajemen ISO 9001

TABEL 6. BAGIAN V : PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN

BAGIAN V : PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN	Kinerja sesuai dengan ISO		Kelengkapan kebutuhan ISO	
	Tingkat Kesiapan	GAP	Tingkat Kesiapan	GAP
Dokumentasi Sistem Manajemen Umum (Ops A)	100.00%	0.00	66.67%	0.33
Pengendalian Dokumen (Ops A)	33.33%	0.67	33.33%	0.67
Pengendalian Rekaman (Ops A)	33.33%	0.67	33.33%	0.67
Tinjauan Manajemen (Ops A)	55.56%	0.44	44.44%	0.56
Audit Internal (Ops A)	33.33%	0.67	33.33%	0.67
Tindakan Korektif (Ops A)	33.33%	0.67	33.33%	0.67
Tindakan Pencegahan (Ops A)	33.33%	0.67	33.33%	0.67

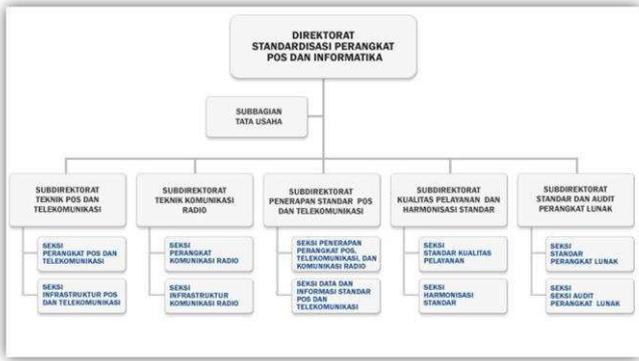
Opsi yang dipilih dalam persyaratan sistem manajemen menentukan bagaimana Direktorat Standardisasi mempersiapkan sistem dokumentasi terhadap persyaratan tersebut. Opsi dalam hal ini dapat dilakukan secara bersamaan, dimana penyusunan dokumentasi untuk opsi A dapat didukung dari opsi B yang berdasarkan sistem manajemen mutu ISO 9001, tetapi dalam hal ini Direktorat Standardisasi menentukan opsi A dengan menyusun masing-masing dokumentasi sesuai dengan kebutuhan dari tupoksi Direktorat Standardisasi dan mengabaikan sistem manajemen mutu dari ISO 9001. Oleh karena itu gap terhadap pemilihan opsi tidak dianggap sebagai suatu keharusan karena hanya menggunakan 1 opsi. Dari hasil self assessment yang dilakukan terhadap Direktorat Standardisasi, sub-kategori dokumentasi sistem manajemen secara umum telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Direktorat Standardisasi meskipun sistem dokumentasi atau langkah kerja yang merupakan persyaratan kelengkapan terhadap kebutuhan ISO/IEC 17065 masih dalam tahap penyusunan. Selain dari sub-kategori tersebut, gap terhadap kelengkapan kebutuhan ISO dalam persyaratan sistem manajemen sebagian besar masih lebih dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut masih dalam tahap perencanaan.



Gambar 10. Grafik GAP Persyaratan Sistem manajemen

6. Struktur Organisasi

Dalam pemenuhan standar ISO/IEC 17065:2012 diperlukan struktur organisasi yang sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam dokumen ISO tersebut, hal ini berkaitan dengan skema sertifikasi dan pertanggungjawaban terhadap dokumentasi. Berikut merupakan struktur organisasi Direktorat Standardisasi :



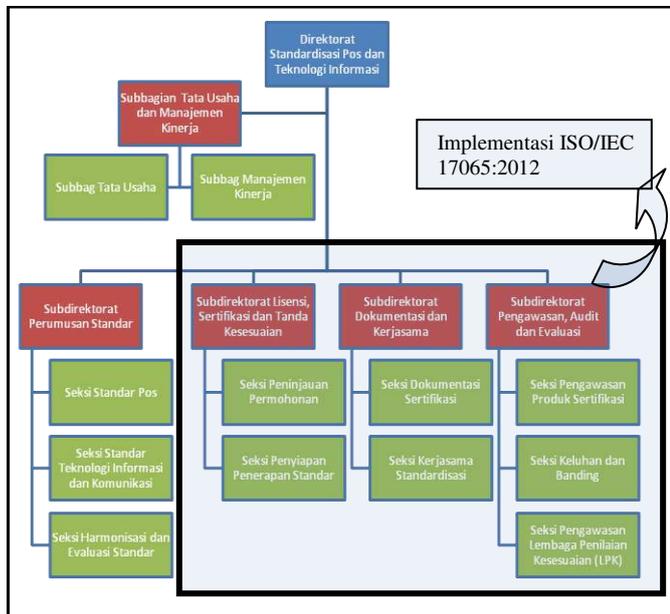
Gambar 11. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi (www.postel.go.id)

Dimana masing-masing subdirektorat memiliki tugas sebagai berikut :

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang yang sesuai dengan nomenklatur subdirektorat
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang yang sesuai dengan nomenklatur subdirektorat
- Penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang yang sesuai dengan nomenklatur subdirektorat

Dimana tugas-tugas tersebut ditangani oleh seksi-seksi yang bernaung dibawah subdirektorat tertentu, sehingga apabila dilihat dari persyaratan yang terdapat dalam dokumen ISO/IEC 17065:2012, struktur organisasi Direktorat Standardisasi dapat disusun agar lebih efisien dalam mendukung tupoksi Direktorat Standardisasi, dengan susunan sebagai berikut :

a. Struktur 1



Gambar 12. Alternatif struktur organisasi 1 sesuai dengan adopsi dari ISO/IEC Guide 17065:2012

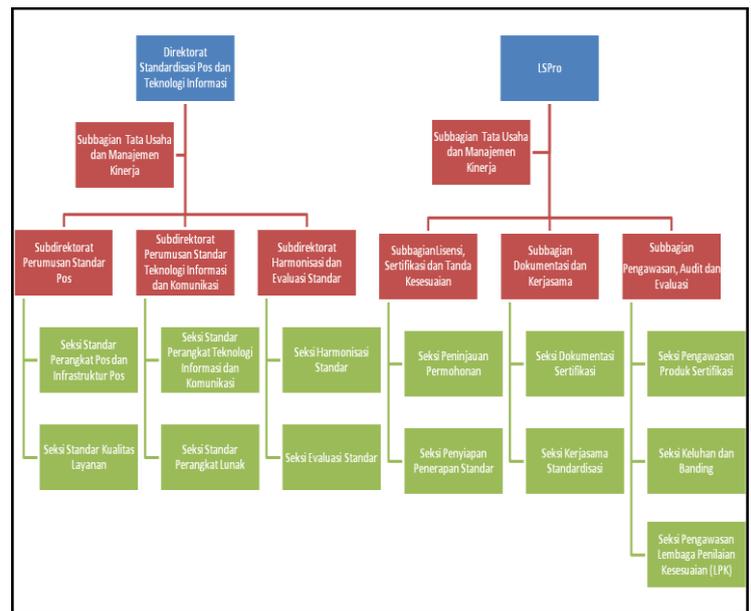
Dalam alternatif struktur organisasi yang pertama, diperlihatkan bahwa hampir seluruh subdirektorat yang berada dibawah Direktorat Standardisasi berubah, meskipun secara tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi masih sama. Dalam alternatif 1, seksi-seksi subdirektorat yang melakukan

perumusan dilebur menjadi satu subdirektorat tersendiri sehingga seluruh data mengenai perumusan standar baik itu dalam bidang pos, teknologi informasi dll, berkumpul dalam satu subdirektorat dengan nama “Subdirektorat Perumusan Standar”. Hal ini bertujuan untuk efisiensi dokumentasi proses dan hasil perumusan standar. Dalam struktur organisasi Direktorat Standardisasi saat ini, masing-masing subdirektorat juga memiliki beberapa fungsi yang terkait dengan sertifikasi produk, sehingga fungsi-fungsi ini dilebur menjadi tiga subdirektorat dalam alternatif struktur pertama, yaitu :

- Subdirektorat Lisensi, Sertifikasi dan Tanda Kesesuaian
- Subdirektorat Dokumentasi dan Kerjasama
- Subdirektorat Pengawasan, Audit dan Evaluasi

Ketiga subdirektorat ini memiliki fungsi yang sama dengan suatu lembaga sertifikasi produk, sehingga apabila ISO/IEC 17065 diterapkan, maka hal tersebut hanya terkait dengan tiga subdirektorat tersebut. Tetapi struktur organisasi ini masih memiliki kelemahan dimana hal-hal mengenai manajemen ketidakberpihakan masih dapat mempengaruhi hasil dari keputusan pemberian sertifikasi produk, hal ini dikarenakan subdirektorat yang memiliki fungsi sebagai lembaga sertifikasi produk masih berada dibawah Direktorat standardisasi yang mempunyai kewenangan dalam menyusun prosedur atau skema sertifikasi begitu pula dengan perumusan dan regulasi standardisasi.

b. Struktur II



Gambar 13. Alternatif struktur organisasi 2

Dalam alternatif struktur kedua, posisi lembaga sertifikasi berada diluar dari struktur lembaga Direktorat Standardisasi dan bersifat independen sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 17065 terkait dengan manajemen ketidakberpihakan, sehingga lembaga sertifikasi produk memiliki keputusan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain terutama dari badan atau organisasi yang menentukan regulasi terkait dengan standardisasi produk, dalam hal ini Direktorat Standardisasi. Sehingga penerapan ISO/IEC 17065 hanya kepada struktur lembaga sertifikasi produk.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari studi ini antara lain :

	Tingkat Kesiapan	GAP
Kinerja sesuai dengan ISO	69.75%	0.30
Kelengkapan kebutuhan ISO	54.88%	0.45

1. Dari hasil *self assessment* yang diberikan kepada Direktorat Standardisasi didapatkan bahwa tingkat kinerja Direktorat Standardisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemenuhan dokumen ISO hal ini menunjukkan bahwa 69,75% pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Standardisasi telah sesuai dengan persyaratan dalam dokumen ISO/IEC 17065, dengan tingkat kesenjangan operasionalisasi.
2. Sedangkan untuk dapat menerapkan ISO/IEC 17065 secara sepenuhnya, Direktorat Standardisasi masih dalam kondisi 54,88%, dengan tingkat kesenjangan dokumentasi. Hal ini terkait dengan pemenuhan dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi atau SOP yang sesuai dengan persyaratan dokumen ISO/IEC 17065.
3. Sebagian besar kinerja Direktorat Standardisasi apabila dilihat dari masing-masing sub kategori telah sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam dokumen ISO/IEC 17065, kecuali untuk beberapa hal yang secara proses memang menjadi kendala bag Direktorat Standardisasi untuk melaksanakannya, seperti dalam kegiatan survailen yang membutuhkan sumber daya yang sangat besar.
4. Hampir seluruh sub kategori persyaratan ISO belum memiliki dokumen langkah kerja atau SOP dan masih dalam tahap penyusunan, kecuali untuk dokumen yang bersifat kelembagaan dan skema sertifikasi.
5. Bila dilihat dari persyaratan ISO yang menegaskan tentang struktur manajemen dan hal lain yang terkait, struktur organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Standardisasi saat ini memiliki kendala untuk mendapatkan ISO/IEC 17065. Kendala tersebut berada dalam manajemen ketidakberpahaman dimana badan yang menyusun standar dan regulasi merupakan badan yang memberikan sertifikasi. Hal ini dapat menyebabkan keputusan hasil

sertifikasi tidak bersifat mutlak dari lembaga atau unit yang melakukan teknis proses sertifikasi dan dapat di interferensi oleh kewenangan diatas lembaga sertifikasi produk atau unit kerja yang melaksanakan fungsi tersebut.

B. Saran / Rekomendasi

Adapun saran dari studi ini antara lain :

1. Menyesuaikan struktur organisasi sehingga dapat sesuai dengan yang tersirat dalam persyaratan ISO/IEC 17065
2. Ada beberapa standar lain yang dapat menjadi acuan dalam pemenuhan ISO/IEC 17065:2012 antara lain :
 - a. ISO/IEC 17025 mengenai kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi
 - b. ISO/IEC 17020 mengenai pengoperasian lembaga inspeksi
 - c. ISO/IEC 17021 mengenai audit dan sertifikasi sistem manajemen
 - d. ISO/IEC 17067 mengenai pengembangan skema sertifikasi
3. Perlu adanya pemenuhan sumber daya dalam pemenuhan tugas penyusunan dokumen kebutuhan ISO/IEC 17065

DAFTAR PUSTAKA

Bakhtiar, A., & Purwangono, B. (n.d.). Analisis Implementasi Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001: 2000 Dengan Menggunakan GAP Analysis Tools (Studi Kasus di PT. PLN (Persero) PILITRING JBN Bidang Perencanaan).

Brocks, H., Hemmje, M., Gomm, M., & Werkmann, B. (2010, June). The PARSE.Insight GAP Analysis. FernUniversitat in Hagen.

BSN. (2012). SNI ISO/IEC 17065. *Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa*. BSN.

De Coi, J. L., Herder, E., Koesling, A., Lofi, C., Olmedilla, D., Papapetrou, O., et al. (n.d.). A Model For Competence GAP Analysis. Germany: L3S Research Center and University of Hannover.

Kemenkominfo. (2010, 10). Permen Kominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010. *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Indonesia.

Muchsam, Y., Falahah, & Saputro, G. I. (2011, Juni). Penerapan GAP Analysis Pada Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. XYZ). *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*, 94-100.

Perdana, B., & Rahardjo, J. (n.d.). Perancangan dan Implementasi ISO 9001:2008 di PT. Bondi Syad Mulia. Surabaya.

Purnomo, D. (2010). *Penerapan ISO/IEC 17025*.

